**PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Oleh:

Sevia Cindy P., Putri Ayu N., Miftakhul Akbar F.
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144 Jawa Timur
seviacindyp989@gmail.com

**ABSTRAK**

 Masyarakat madani merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan identik dengan kemoralan yang sangat baik. Konsep kehidupan masyarakat madani yang seimbang,tentram dan terstruktur adalah cita-cita yang diinginkan oleh Bangsa Indonesia. Perjalanan Bangsa Indonesia yang sangat panjang merupakan proses untuk membangun kehidupan bernegara seperti masyarakat madani. Maka dari itu, pada era kemajuan inilah Bangsa Indonesia haruslah membangun kehidupan bernegara seperti masyarakat madani dalam pengembangan di bidang agama, politik, ekonomi,sosial budaya, pertahanan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pemerintah seperti masyarakat madani digunakan sebagai terciptanya kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi rakyat Bangsa Indonesia.

Kata kunci : Masyarakat madani, pancasila, paradigma

**A.PENDAHULUAN
 Latar Belakang**

 Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara tentunya menjadi suatu langkah dalam proses pembenahan karakter dalam diri setiap individu untuk dapat hidup sesuai tata aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan sesuai dengan norma yang berlaku.Dalam lingkup pembahasan kali ini, kami memilih materi ini dengan tujuan agar sistem tata peraturan dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pancasila yaitu setiap individu dalam masyarakat baik secara perilaku maupun bersikap harus mengikuti nilai dasar Pancasila.Mengapa dalam berperilaku harus dikaitkan dalam nilai dasar pancasila.Sebab dalam bentuk negara yang menganut sebuah ideologi seperti Indonesia memang segalanya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.Namun, dalam kondisi saat ini, nilai pancasila sudah bukan lagi menjadi acuan dalam kehidupan.Sedangkan dalam setiap peraturan bermasyarakat selalu ada sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.Baik itu sanksi adat maupun sanksi yang tertuai dalam UUD 1945.Semakin berkembangnya IPTEK, budaya yang datang dari manapun tidak seluruhnya bisa *difilter* dengan baik. Sedikit banyak selalu berhasil mempengarui gaya hidup masyarakat saat ini. Perubahan arus globalisasi yang sangat signifikan dapat merubah struktur tatanan aturan yang ada.Contoh yang paling dasar dan dijumpai dimanapun yaitu tentang tata krama.Individu pada umumnya sudah diberikan nilai ajaran sopan santun sejak dini di lingkungan keluarga.Namun yang terlihat saat ini, justru tata krama dianggap tidak terlalu penting dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.

 Pada era ini, kehidupan masyarakat banyak dikotori oleh banyaknya perampasan hak asasi manusia.Bahkan yang paling parah yaitu seringkali masyarakat kalangan atas dan kalangan yang memiliki kekuasaan menindas rakyat kecil atau kalangan bawah, karena krisisnya nilai pancasila dalam implementasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Krisis moral yang dibuktikan dengan ketidaksesuaian sikap pada setiap nilai pancasila menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku baik. Akibatnya, masyarakat memanipulasi segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Perampasan hak berupa penipuan dan penganiayaan merupakan salah satu manipulasi yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Baik rakyat kecil maupun kalangan atas ,tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perampasan hak. Dengan demikian, moral terbentuk dari masing-masing pripadi yang bergantung pada keimanan yang dimiliki.Keimanan merupakan sumber dari akhlak dan moral yang terbentuk. Hal ini sejalan dengan masyarakat madani yang memiliki sifat sama dengan kehidupan masyarakat Madinah. Masyarakat tersebut sangat menjunjung tinggi nilai toleransi yang bersumber dalam ajaran al-qur’an.

**B.PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Paradigma**

 Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir ([kognitif](https://id.wikipedia.org/wiki/Kognitif)), bersikap ([afektif](https://id.wikipedia.org/wiki/Afektif)), dan bertingkah laku ([konatif](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konatif&action=edit&redlink=1)). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual. Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari [bahasa Latin](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin) pada tahun 1483 yaitu *paradigma* yang berarti suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani *paradeigma* (para+deiknunai) yang berarti untuk "membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan (deik) . Steven Covey, dalam bukunya "7 Habits Of Highly Effective People" mendefinisikan paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu: pandangan kita, kerangka acuan kita atau keyakinan kita. Paradigma adalah seperti kacamata. Steven Covey merangkum bahwa ada 3 paradigma pada umumnya: paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain dan paradigma tentang kehidupan.

 Paradigma ialah sumber acuan yang menjadi bahan pertimbangan bagi proses berpikir dan bertindak. Dengan demikian ketika suatu nilai ditempatkan sebagai suatu paradigm4 maka nilai-itu akan mengejawantah dalam cara berpikir dan cara bertindak seseorang. Agus Salim (2006: 96) mengatakan "paradigma adalah rorsr ro I tur.rr zot: basis kepercayaan utama atau metafisika dari sistem berpikir: basis dari ontologr, epistemologi, dan metogologi". Lebih lanjut Agus Salim (2006: 96-92) menguraikan bahwa dalam pandangan filsafat paradigma memuat pandangan-pandangan awal yang membedakan, memperjerlas, dan mempertajam orientasi berpikir seseorang.

 Dengan demikian digunakannya nilai sebagai paradigma akan membawa konsekuensi bagi perilaku, cara berpikir, interpretasi, dan kebijakan dalam penyelesaian masalah. Thomas S. Khun (1920) sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2003:226) menjelaskan pengertian paradigma sebagai asumsi dasar dan asumsi teoritis yang merupakan suafu sumber nilai, sehingga merupakan suafu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menenfukan sifat cirri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. pendapat senada dikemukakan oleh Kaelan (2003: 226-227) bahwa istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber azas serta arah dan fujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suafu bidang tertenfu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa paradigma adaiah sumber nilai, sumber acuan, dan kerangka berpikir. Peran paradigma dalam proses berpikir dan bertindak adalah merupakan suatu dialog intensif guna menghasilkan suatu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. (Suranto : 2013)

**2.2 Konsep Masyarakat Madani**

 Pengertian dari Masyarakat madani yaitu masyarakat beradab yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kata madani merupakan penggambaran sifat terhadap kehidupan masyarakat madinah. Kehidupan masyarakat Madinah merupakan penggambaran masyarakat yang ideal dalam bidang apapun karena mereka hidup rukun dengan toleransi dan menjalankan kehidupan bersumber pada al-quran.Masyarakat madani merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hak kemanusiaan yang ada, sehingga masyarakat ini tidak dapat dimanipulasi oleh negara. Ada dua masyarakat yang termasuk golongan masyarakat madani yaitu masyarakat negeri Saba' dan masyarakat kota Yatsrib. Masyarakat negeri saba' yaitu masyarakat yang hidup pada zaman Nabi sulaiman AS. Dalam al-quran tertulis makna tentang keadaan masyarakat saba' memiliki negeri yang baik, subur, dan nyaman karena disana terdapat tanaman yang sunur dan rezeki yang melimpah sehingga dapat memenuhi kehidupan masyarakatnya. Semua kenikmatan tersebut merupakan wujud kasih sayang Allah untukmasyarakat saba'. Tetapi pada akhirnya masyarakat saba' berperilaku kafir pada Allah sehingga membuat-Nya murka terhadap negeri saba'. Sedangkan kota Yastrib adalah kota yang terbentuk setelah adanya traktat yang berisi perjanjian antara Rasulullah SAW beserta umat islam dengan penduduk Yastrib yang beragama Yahudi dan Watsani. Madinah adalah nama baru dari kota yasrib yang menjadi tempat terakhir Rasullullah SAW setelah hijrah. Adanya kota Madinah juga dimulai dari pengeluaran perjanjian madinah yang berisi kesepakatan berupa kebebasan masyarakat yang heterogen pada kala itu. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW sebagai bibit negara demokratis di dunia.

 Istilah masyarakat madani di Indonesia popoler pada tahun 90-an. Tetapi, istilah tersebut dikenal melalui istilah yang sering digunakan bangsa barat yaitu civil society. Sedangkan masyarakat madani jika dilihat dari konsep masyarakat Madinah adalah kata civilized society.M. Riyas Rasyid (dalam Hayat,Suratman 2018) Civilized society dalam arti masyarakat yaang berbudaya yaitu suatu masyarakat yang saling menghargai nilai-nilai sosial kemanusiaan. Menurut Nurcholish Madjid, kata "madinah" berasal dari Bahasa Arab "madaniyah" yang berati peradaban. Hal ini merupakan bukti jika masyarakat madani juga memiliki arti masyarakat yang beradab.

 Konsep yang dimiliki oleh masyarakat madani sudah diinginkan oleh masyarakat Indonesia.Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman dan memiliki berjuta-juta pulau yang tersebar di dalamnya.Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Tetapi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara Indonesia masih tergolong kurang kualitasnya. Pemikiran yang masih bersifat individualis dan rasisme antar individu masih sering terjadi di Negara Indonesia. Suroto (2015,668) Salah satu ciri dari kehidupan bermasyarakat Indonesia ialah kebhinnekaan dari bangsa Indonesia. Itu artinya, Kebudayaan di Indonesia yang sebenarnya adalah bersifat religius dan berbudi luhur, adil, demokratis dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan**.** Sayangnya**,**Bangsa Indonesia tidak mudah untuk mewujudkan kebudayaan masyarakat madani dalam aspek apapun. Ketidakmampuan ini dilatarbelakangi oleh masa orde baru yang menjalankan sistem pemerintahan otoriter sehingga tidak melakukan aspek demokratis. Kedemokratisan yang sederhana dan belum ada dalampemerintahan orde baru yaitu kebebasan dalam mengekuarkan pendapat sehingga mengandung ketidakadaan HAM para rakyatnya.Suroto (2015,667) Perkembangan orde lama dan munculnya orde baru memunculkan secercah harapan bagi perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Pada masa orde baru tercipta pertumbuhan ekonomi, tergesernya pola kehidupan masyarakat agraris, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah dan makin tingginya tingkat pendidikan. Dalam bidang politik, orde baru memperkuat posisi negara di segala bidang,. Hal tersebut berakibat pada terjadinya kemerosotan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat serta menyempitkan ruang ruang bebas yang dahulu pernah ada, sehingga prospek masyarakat madani kembali mengalami kegelapan.

 Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia mengalami perkembangan arus globalisasi. Globalisasi merupakan bentuk perkembangan secara internasional yang terjadi karena pertukaran segala aspek yang ada, seperti sosial budaya. Srijanti dkk (2009:241)Umat islam belajar dari bebagai cerita lampau seperti renaissance bangsa barat yaitu kisah umat islam yang pada akhirnya menjadi pundak bagi bangsa barat sesudah mencari pengetahuan dengan orang barat.Perbedaan yang ada membuat setiap wilayah saling berinovasi untuk memunculkan hal baru di negaranya. Inovasi inilah yang menyebabkan arus globalisasi yang menjadi sangat cepat. Nursalim (2016:44) Globalisasi masih terus menjadi perbincangan para ahli, ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang mengubah kebudayaan masyarakat dalam peadaban manusia. Perkembangan teknologi maupun kebudayaan yang selalu ada merupakan bukti nyata dari adanya arus globalisasi. Masyarakat madani atau yang disebut dengan masyarakat sipil merupakan sekumpulan masyarakat yang melek terhadap perkembangan global. Pemikiran yang wajibdiperbarui bagi masyarakat madani bertujuan untuk mengikuti arah perkembangan yang terjadiagar tidak dapat dimanipulasi oleh negaranya sendiri.

 Dengan demikian, masyarakat modern seperti saat ini sebenarnya sudah dapat menerapkan kebudayaan dan nilai moral dari masyarakat madani. Tetapi, bentuk usaha untuk mewujudkan karakter yang ada dalam masyarakat madani dapat dilakukan secara berkala dan terus menerus. Umat islam di Indonesia merupakan umat yang dianggap sebagai pengaruh kebudayaan dan perkembangan apapun yang ada di negara Indonesia karena keberadaannya yang menjadi mayoritas. Nenek moyang Bangsa Indonesia adalah para pejuang yang agamis dan menjunjung tinggi nilai moral. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia haruslah selalu mencetak generasi yang berlandasan moral yang sangat baik seperti masyarakat madani. (syifaul : 2016)

**2.3 Posisi Dan Peran Umat Islam Di Indonesia**

Kerukukan antar umat beragama merupakan suatu kondisi dimana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya. Oleh sebab itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin bisa lahir dari sikap fanatisme buta serta sikap tidak peduli atas hak-hak keberagaman dan perasaan orang lain. Namun dalam hal ini tidak juga bisa diartikan bahwa kerukunan hidup diantara umat memberi ruang sebagai campurtangan unsur-unsur tertentu dari agama berbeda, karena hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri.Seperti halnya dalam pengembangan di bidang pembangunan negara.Semua rakyat harus saling bahu-membahu dalam mewujudkan pembangunan negara yang maju. Namun, saat ini SDM umat islam belum mampu menunjukkan kualitasnya yang unggul. Karena itu, dalam pengaruh lingkup global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, belum mampu menunjukkan perannya yang signifikan. Meskipun secara keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia mayoritas islam bahkan hampir 85% tidak menjadi tolak ukur sektor pembangunan akan sukses. Hal ini disesbabkan oleh SDM di negara kita masih rendah dan dari segi politik juga sistem politik sosial ekonomi juga tidak dijiwai oleh nilai-nilai islam. Karena dapat kita ketahui bahwa keberagaman agama juga menjadi salah satu sebab mengapa dalam menjalankan proses tatanan negara tidak boleh menyertakan karakter intern dari suatu agama.

 Dalam peradaban masyarakat islam yang dicontohkan dalam kehidupan masyarakat madani terdapat tiga pilar penyokong tegaknya sebuah daulah. Pilar pertama yaitu perjuangan secara *iqamatul masjid*, yang dapat diartikan bahwa setiap muslim yang bercita cita hendak memperjuangkan tegaknya islam haruslah terlebih dahulu menegakkan peribadatannya kepada Allah swt. Pilar yang kedua yaitu *ukhuwah islamiyah*, yang dapat diartikan sebagai bentuk perjuangan dengan membangun struktur komunitas masyarakat muslimah yang tangguh, menyusun tata sosial ekonomi yang merata dan adil, menerapkan asas kekeluargaan, sosialisme dan kolektivitas dengan rasa dan kesetiaan dalam satu aqidah. Dan pilar yang terakhir yaitu *daulah islamiyah*, yang dimana sebuah puncak perjuangan Rasulullah dalam menegakkan dinul islam disebuah daulah islam.

 Umat islam pada dasarnya mempunyai aturan hidup yang sempurna dan sesuai dengan fitrah kehidupannya. Dalam hal ini dapat kita ketahui pula bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang lebih banyak mengeksploitasi simbol-simbol islam, melainkan masyarakat yang mampu membawa subtansi islam dalam setiap gerak kehidupan masyarakat. Masyarakat madani juga memerlukan pribadi tulus untuk mengeratkan keadilan.Jika hal tersebut terwujud pastilah sikap saling menghargai antar sesama dapat menjadi patokan apabila terjadi berbedaan kesalahpahaman dalam bertukar pendapat.Pentingnya sebuah rasa kemanusiaan dan persatuan tentunya menjadi sebuah tolak ukur bagi sebuah negara. Karena tanpa masyarakat yang utuh sebuah negara tidak dapat dibentuk dan akan saling berperang melawan rumpun persaudaraan. Sikap yang ditimbulkan dari toleransi itu pula yang akan menghantarkan suatu negara kepada utuhnya persatuan bangsa.

 Berdasarkan pemahaman tentang karakter bangsa Indonesia seperti diuraikan di atas, maka dapat kita peroleh gambaran tentang betapa penting dan proporsionalnya topik bahasan ”Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Bangsa”, ini. Misi yang diemban Pendidikan Agama Islam adalah mendidik manusia untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa sehingga muaranya adalah terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang sejahtera, masyarakat dalam kehidupan di alam semesta yang rahmatan lil alamin. Namun, dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang sosialis-religius, PAI memiliki peran yang lebih spesifik sekaligus strategis karena beberapa hal. Pertama, secara epistemologis, Islam sangat menjunjung tinggi komitmen keilmuan yang menjadi sumber kemajuan suatu bangsa (QS Al-Maidah 11). Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah membaca yang substansinya menggugah pentingnya ilmu pengetahuan (iqra’). PAI memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan manusia-manusia yang mampu mengemban amanah, ikut berpartisipasi menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam alam semesta ini (QS Ali Imran 190) bagi kesejateraan umat (rahmatan lil’aalamiin). Dalam Islam, relasi agama dan ilmu pengetahuan sangat berdekatan dan bahkan tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini fisikiawan terbesar abad XX, Albert Einstein mengakui: science without religion is lame, religion withoutscience is blind. Dalam Islam, kualitas keimanan dan keilmuaan merupakan faktor penentu kemulyaan dan keunggulan daya saing manusia dan tentunya juga untuk sesuatu bangsa (QS Al-Mujadalah 11).

 Kedua, secara sosiologis, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka PAI memiliki tanggungjawab lebih untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan negeri ini. Kemajuan berlandaskan spirit of Islam yang mendorong pemeluknya selalu menempa diri agar berguna bagi masyarakat luas karena etosnya sebagai manusia yang senantiasa bekerja keras, sekaligus bekerja cerdas dan bekerja ikhlas. Islam mendorong umatnya menjadi manusia yang kreatif, inovatif, responsif dan prospektif, yang kesemuanya itu harus tetap dalam koridor bingkai ketakwaan dan mencari ridha Allah (QS. Al-Hasya 18). Dalam semangatnya yang demikian maka PAI ikut bertanggung jawab membangun jiwa optimistis umat, karena memang tidak boleh terjadi adanya kegamangan spiritual. Dalam hal ini saya yakin melalui karya pengabdian masyarakatnya selama ini, sumbangsih PAI telah dirasakan oleh masyarakat dan negara. Namun seiring berkembangnya tantangan yang dihadapi, semakin luas juga tuntutan untuk berbuat dengan segala inovasinya. Ketiga, secara historis, Islam telah memberi sumbangsih besar bagi peradaban dunia. Sebagaimana kita maklumi, pada milenium pertama, di dunia Islam bermunculan tokoh-tokoh muslim dan filosof muslim sebagai ikon kemajuan peradaban Islam saat itu yang diakui oleh dunia sampai saat ini. PAI sebagai kawah pengembangan intelektualitas memiliki peran penting untuk mengembalikan kejayaan peradaban dan pendidikan Islam dengan melahirkan kembali sosok-sosok intelektual muslim yang memiliki integritas secara intelektual, moral, dan spiritual. Baik melalui komitmen keilmuan maupun komitmen kebangsaannya.

 Keempat, secara sosio-historis, Islam Indonesia menjadi ikon bagi munculnya Negara Bangsa (nation state). Umat Islam memberikan sumbangsih yang sangat bernilai atas berdiri dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam hal ini umat Islam Indonesia menghendaki Indonesia sebagai negara bangsa (nation state) bukan negara agama (teokrasi). PAI memiliki peran strategis untuk mengawal dan merawat pengorbanan para pendiri Republik ini yang terdiri dari para tokoh Islam dan ulama melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai identitas sekaligus karakter bagi masyarakat. Peran yang dijalankan oleh umat Islam Indonesia sejak sebelum kemerdekaan merupakan wujud kecintaan pada negara dan bangsa. Karena itu, karakter kebangsaan bagi umat Islam Indonesia sesungguhnya merupakan sisi lain dari satu mata uang karakter keIslaman.

 Kelima, PAI tentunya juga mempunyai peranan penting dalam transformasi nilai-nilai ajaran Islam yang menyejukkan dan membangun semangat optimistis, bukan menyebar ketakutan ataupun semangat pesimistis. Yang demikian ini karena nilai-nilai ajaran Islam adalah menjanjikan ketenangan dan kedamaian. PAI juga berperan dalam mencegah dan mengatasi konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terlebih konflik yang terjadi antar umat Islam sendiri.

 **2.4 Kerukunan Hidup Antara Umat Beragama**

 Agama Islam adalah agama yang Allah turunkan sejak manusia sekaligus sebagai nabi pertama yaitu Nabi Adam. Lalu diturunkan kepada para Nabi dan Rasul sesudah Nabi Adam. Agama islam pada zaman sebelum Rasulullah tidak menyampaikan pesan secara langsung, tetapi dapat dimaknai melalui sikap Rasul yang menjadi teladan bagi umatnya. Nabi terakhir dari penurunan agama islam yaitu Muhammad Saw pada awal abad ke-VII masehi. Pada awal penyampaian dari Rasulullah dalam mengenalkan islam kepada masyarakat Arab, Rasulullah mendapat sikap yang heran dan tidak senonoh. Mereka menganggap ajaran yang disampaikan Rasulullah adalah ajaran yang menyimpang dari tradisi leluhurnya yang turun temurun.Padahal, mereka tidak cukup tau tentang makna tradisi tersebut dalam kehidupannya adalah ajaran yang salah.

 Fungsi Islam terdapat pada kerahmatan yang diberikan oleh Allah. Fungsi islam sebagai rahmat ini dijelaskan pada QS. Al-Anbiya’107, yang memiliki arti “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.Makna dari kerahmatan tumbuhnya pada manusia itu sendiri, yang berarti kenikmatan yang dapat dirasakan baik oleh diri sendiri maupun makhluk lain. Bentuk kerahmatan dari Allah tersebut disebutkan dalam ajaran islam. Bentuk kerahmatan pertama adalah islam menunjukkan manusia jalan hidup yang benar. Hal ini bermakna ajaran islam bersifat ta’abbudi dan ta’aqulli. Ta’abbudi selalu berkaitan dengan iman dan keesaan, sedangkan ta’aqulli berkaitan dengan kemampuan manusia dalam mencari tahu dan bisa dicerna secara logika yang diarahkan oleh ajaran islam.

 Bentuk kerahmatan yang kedua adalah islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah secara bertanggung jawab.Bentuk kerahmatan yang kedua ini bermakna bahwa Allah sudah menyerukan kepada manusia tentang tindakan baik dan batil. Allah juga tidak memaksa manusia untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi, setiap tindakan yang dilakukan memiliki ganjaran yang sesuai, baik tindakan baik ataupun batil.Namun, ketika seorang manusia berada pada titik kegelapan mereka cenderung melakukan kegiatan yang batil atau merugikan mereka secara pribadi. Lalu, ketika seseorang tersebut telah menemukan jalan untuk menjadi baik, mereka akan menyadari dan menyesali perbuatanya pada masa kegelapan.Kesadaran tersebut menciptakan terbentuknya hikmah yang digunakan sebagai pembelajaran hidup sehingga memiliki kehidupan yang tentram.Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keterbukaan atau bersifat flesibel terutama dalam memetik sebuah hikmah, hikmah didapat oleh orang yang kehilangan arah sehingga ketika seseorang tersebut telah menjadi orang mukmin, maka ia akan selalu mengambil suatu pembelajaran dari hikmah tersebut (Rakhmat, 1991: 15).

 Bentuk kerahmatan yang ketiga adalah islam menghargai dan menghormati semua manusia sebagai hamba Allah, baik mereka muslim maupun non-muslim. Dalam hal ini, makna yang tersirat adalah islam mngajarkan sikap toleransi yang tinggi dalam hubungan antar manusia karena pada dasarnya manusia muslim maupun nonmuslim memiliki persamaan yaitu hamba Allah.Toleransi ini merupakan sikap Rasulullah SAW yang menjadi tauladan bagi seluruh umat islam di dunia. Allah memandang semua manusia sama baik kedudukan, hak, maupun kewajiban manusia ketika di dunia. Namun, yang membedakan di hadapan Allah adalah perilaku dan hati setiap manusia.Segala tindakan yang dilakukan selalu mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang harus dibayar.Oleh karena itu, manusia seharusnya selalu berpikir tentang baik buruk dalam bertindak sehingga manusia dapat berlaku adil dalam menentukan sesuatu.

 Bentuk kerahmatan yang keempat adalah islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan proporsional. Hal ini bermakna segala sesuatu yang diciptakan di bumi dapat dimanfaatkan oeh manusia.Tetapi baik hewan maupun tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, terdapat hukum islam berupa halal dan haram dalam pemanfaatannya. Selain itu, dalam hal pengelolaan untuk menjadi makanan juga diatur dalam al-qur’an maupun hadist. Rasulullah pernah mengajarkan cara menyembelih hewan dengan baik yaitu dengan menggunakan pisau yang tajam agar tidak menyakiti hewan yang disembelih.

 Bentuk kerahmatan yang kelima adalah islam menghormati kondisi spesifik individu manusia dan memberikan perlakuan yang spesifik pula. Sebenarnya, bentuk kerahmatan ini hampir sama dengan bentuk kerahmatan yang ketiga. Tetapi, yang membedakan adalah inti dari bentuk kerahmatan ini adalah rasa kepedulian hokum islam dalam mengerti kondisi fisik bagi pemeluknya. Contoh dari kerahmatan ini adalah ketika ada orang yang disebut musafir diberi nikmat yaitu diizinkan untuk berbuka terlebih dahulu ketika pada hari itu sedang berpuasa. Contoh lainnya adalah ketika seorang umat islam yang tertidur pulas hingga lupa dengan waktu solat maka solatnya bisa dilaksanakan setelah bangun pada waktu itu juga.

 Kelima kerahmatan tersebut merupakan bentuk umum dari segala banyak kenikmatan tak terhingga yang diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad saw merupakan rasul utusan Allah yang diberikan amanah untuk meluruskan kaidah kaidah hukum islam yang ada di bumi yang terdapat pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Ada dua macam islam yaitu konseptualyang berarti berpandangan pada sumber dari apa yang dipelajari seperti al-Quran, Al- Sunnah, serta buku dan ceramah dan aktual, Islam konseptual dan islam actual yang berpandangan pada sikap dari umatnya (Rakhmat, 1991: 18).

**2.5 Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan**

 Pancasila sebagai paradigma masyarakat madani menerapkan segala aspek pembangunan pada hakikat nilai-nilai pancasila,pembangunan tersebut adalah pembangunan IPTEK yang diimbangi oleh IMTAQ POLEKSOSBUDHANKAM (Politik,ekonomi,sosial budaya ,serta pertahanan dan keamanan).Pembangunan masyarakat madani juga mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga perdamaian baik didalam negeri maupun internasional.Pancasila sebagai paradigma kehidupan beragamamenyebutkan bahwasannya hanya ada 6 agama yang diakui oleh negara dan dijamin kebebasan kegiatan keagamaannya dan yang tidak diakui oleh negara,tidak dijamin dalam kebebasan kegiatan keagamaannya. Meskipun seperti itu pemerintah berharap masyarakat tetap menjaga keharmonisan dalam beragama serta tetap bertoleransi,menghargai,dan menghormati dalam beribadah.

 Tujuan pengembangan kehidupan beragama adalah terciptanya kehidupan sosial yang aman dan tentram, serta saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundammental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta ini.Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam wilayah negara di mana mereka hidup. Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeliik agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia memberikan kebebasan atas kehidupan beragama atau dengan lain perkataan menjamin atas demokrasi di bidang agama. Oleh karena setiap agama memiliki dasar-dasar ajaran sesuai dengan keyakinan masing-masing maka dalam.pergaulan hidup negara kehidupan beragama hubungan antarapemeluk agama didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan yang beradab hal ini berdasarkan pada nilai bahwa semua pemeluk agama adalah sebagai bagian dari umat manusia di dunia.Indonesia termasuk kedalam negara yang mampu bertoleransi tinggi terhadap agama lain,karena kemajemukan dan keberagaman yang didukung oleh banyak nya pulau yang ada di indonesia.

 Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK dan Imtaq memanfaatkan segala pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus sesuai dan selaras dengan Imtaq yang mengharuskan ilmu tersebut juga harus dapat meningkatkan ketakwaan masyarakat terhadap tuhan.Teknologi tersebut juga harus dapat berguna untuk seluruh masyarakat yang ada di bumi Indoensia.Pancasila pun selalu menjadi tolak ukur,serta arah tujuan dari teknologi tersebut bagi masyarakat di Indonesia. Atas dasar kreativitas akalnya manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan yang Maha Esa.Oleb karena itu.tujuan yang essensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan Iptek.Sila Ketuhanan yang Maha Esa,mengimplementasikan ilmu pengetahuan,mencipta, perimbangan antara rasional dan irasional, antara akal jasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibataya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan melestarikan. Sila kemanusian yang adil dan beradab,memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek haruslah bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.Sila persatuan Indonesia, mengimplementasikan universalia dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan Iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia yang termasuk kesejahteraan bangsa Indonesia.Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek.Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengimplementasikan pengembangan Iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungankan dengan dirinya sendiri,manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masy'arakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.Selanjutnya dalam paradigma pengembangan bidang politik Pancasila harus dapat meningkatkan kodrat dan martabat manusia dalam pembangunan politik Indonesia yang mulai bertolak dari manusia sebagai subjek dan memperkuat kekuasaan tertinggi pada rakyat.pengembangan bidang politik harus berdasarkan pada tuntutan hak-hak dasar kemanusiaan yang dalam ilmu hukum disebut sebagai Hak Asasi Manusia(HAM).Pancasila juga dapat sebagai bentuk moralitas terhadap sistem politik di negara Indonesia.Setiap individu di Indonesia memiliki hak politik yang sama,tidak mendiskriminasi atau mengeksploitasi mayoritas maupun minoritas. Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urut-urutan sistematis, bahwa dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan (Sila IV), adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut moral Ketuhanan (Sila I), moral kemanusiaan (Sila II) dan moral persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (Sila III).Dalam sila ke V terdapat aktualisasi dan pengembangan politik negara Indonesia demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama. Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu-makhluk sosial yang teijelma sebagai rakyat.Maka kekuasaan negara harus mendasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat.Maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat bukannya kekuasaan perseorangan atau kelompok.

 Pancasila sebagai paradigma pengembangan Ekonomi. Jarang ditemukan pakar ekonomi yang mendasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan.Lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan akhirnya yang terkuat lah yang menang.Ilmu ekonomi pada akhir abad ke 18 menumbuhkan ekonomi kapitalis dan pada abad ke 19 muncullah pemikiran lain atas perkembangan ekonomi tersebut yaitu sosialisme komunisme yang memperjuangkan nasib kaum proletar yang selalu ditindas oleh kaum kapitalis. Mubyarto kemudian mengembangkan suatu ekonomi yang berlandaskan kerakyatan yaitu ekonomi humanistik yang bertujuan demi kesejahteraan seluruh rakyat secara luas.Maka sistem ekonomi bangsa Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa.Tujuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa ekonomi itu sendiri ialah untuk menyejahterakan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat.Dalam pembangunan ekonomi sistem yang harus diterapkan dalam membangun ekonomi nasional harus berpijak pada nilai-nilai moral pancasila.secara khusus,sistem ekonomi berdasarkan moralitas ketuhanan(sila I) dan kemanusiaan (sila II).

 Sistem ekonomi pancasila tidak menguntungkan bagi individu tetapi menguntungkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.Oleh sebab itu,ekonomi harus dikembangkan dengan paradigma pembangunan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan seluruh masyarakatnya tanpa ada sistem tebang pilih.Pembangunan ekonomi juga harus dapat menghindari adanya kegiatan monopoli,eksploitasi,dan segala bentuk persaingan bebas dan bentuk lain nya yang mungkin akan menimbulkan penindasan,diskriminasi,penderitaan dan kesengsaraan warga negara. Begitu pula dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang sosial budaya dalam hal ini pembangunan pengembangan sosial budaya setidaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi disegala bidang yang ada.Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial hudaya.Sebagai kerangka kesadaran Pancasila dapat merupakan dorongan untuk (I) univer-salisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur.dan (2) transendentalisasi. yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan, manusia, dan kebebasan spiritual (Koentowijoyo, 1986).Oleh karena itu dalam masa reformasi ini kita harus meningkatkan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai-nilai pancasila itu sendiri.Dalam proses reformasi dewasa ini sering kita menyaksikan segala macam gejolak masyarakat yang terkadang terlampau jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.Prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik,artinya nilai-nilai pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya.Dalam rangka pengembangan sosial budaya,pancasila sebagai kerangka kesadaran yang dapat mendorong universalisasi yaitu melepaskan segala unsur simbol dari keterkaitan struktur dan transendentalisasi yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia,kebebasan spiritual.Fakta dan kata ialah suatu realira,inilah hakikat pancasila dalam membangun simbiosis mutualisme dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara yang mengarah pada nilai universalis dan humanis.

 Yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pengembangan bidang Hankam demi menegakkan hak-hak warga negara maka diperlukan aturan perundangan-undangan negara baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi segenap wilayah dan bangsanya.Demi tegaknya integritas seluruh masyarakat negara diperlukan dalam suatu pertahanan negara,untuk itu diperlukan aparat keamanan negara dan aparat penegak hukum.Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara,Oleh sebab pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusian monopluralis,maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraau hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Sila I dan II).Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warga sebagai warga negara (Sila III). Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (Sila IV) dan akhimya pertahanan dan keamanan haruslah diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam hidup rnasyarakat (terwujudnya suatu keadilan sosial) agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenamya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan.Hal ini memiliki makna bahwa tugas dan tanggung jawab menjaga pertahanan dan keamanan NKRI adalah amanat yang diberikan negara pada alat negara yaitu TNI angakatan Darat,udara,maupun laut.tugas pertahanan dan keamanan bukan hanya amanat untuk TNI melainkan untuk masyarakat yang Indonesia secara keseluruhan.Dengan demikian sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA). Dalam perspektif lain,pertahanan dan keamanan negara harus mendasar pada beberapa tujuan utama,antara lain;demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa,mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok/golongan,dan menjamin hak-hak dasar warga negara,menjamin persamaan derajat serta kebebasan yang bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

**2.6 Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi**

Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah dimana apabila terjadi suatu perubahan kedepannya maka asumsi-asumsi dasar atau nilai-nilai yang mendukung perubahan tersebut haruslah selalu berlandaskan pada pancasila.Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam system Negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia.

Bahkan pada hakikatnya reformasi itu sendiri adalah mengembalikan tatanan kebenaraan kearah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang baik pada masa orde lama maupun orde baru. Pembentukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif seakan tidak sadar diri tentang tugas mereka sebagai wakil rakyat. Makna dari Pancasila seakan menjadi topeng dari pemerintah dalam membuat kebijakan. Lembaga kerakyatan yang berkedudukan tinggi hanya sebatas simbolik dan hukum diciptakan seakan dikehendaki oleh demokrasi padahal dibentuk untuk perlindungan bagi keuntungan pribadi (Hakim 2013:3). Oleh karena itu, proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam nilai dasar Pancasila. Makna dari setiap butir pancasila digunakan sepenuhnya dlam mengatur kebijakan apapun.

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat menjadi jerah atas ulah para petinggi negara pada masa orde lama maupun orde baru. Makna dari demokrasi sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Kata demokrasi hanya sebatas janji pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan trauma mendalam bagi rakyat yang mengalami penindasan. Sistem pemerintah yang sentralistik(sistem terpusat) membuat masyarakat tidak merasakan keadilan di setiap kebijakan yang dibuat. Falsafah kekuasaan sentralistik yang berarti kekuasaan sepenuhnya berada di tangan raja atau kepala pemerintahan merupakan hal yang bertolak belakang dengan falsafah kekuasaan demokrasi (Hakim 2013: 5).

Lenyapnya orde baru dan diganti dengan masa reformasi ditandai dengan penurunan jabatan dari presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Kejerahan rakyat Indonesia semakin membara sehingga timbullah gerakan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat untuk menuntut adanya reformasi dalam bidang apapun terutama politik,ekonomi, dan hukum. Sejak saat itu, presiden Soeharto digantikan oleh Prof.Dr. Ing. B.J. Habibie. Pada masa Bapak Habibie inilah, reformasi direalisasikan dalam bidang apapun. Kebijak yang dibuat sepenuhnya atas dasar rakyat. Oleh karena itu, rasa demokrasi yang berarti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat mulai dirasakan pada masa ini.

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik.Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN dan menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan.

 Dalam era reformasi akhir-akhir ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum sudah merupakan suatu keharusan karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Agenda yang lebih konkrit yang diperjuangkan oleh para reformis yang paling mendesak adalah reformasi bidang hukum.Produk hukum baik materi maupun penegakkannya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, serta keadilan. Sub-sistem hukum nampaknya tidak mampu menjadi pelindung bagi kepentingan masyarakat dan yang berlaku hanya bersifat imperatif bagi penyelenggara pemerintahan.

Landasan sumber nilai sistem politik Indonesia dalam pembukaan UUD’45 alenia IV, jika dikaitkan dengan alenia II, dasar politik ini menunjukkan bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat Indonesia.Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara maupun untuk menunaikan dua tugas pokok yaitu memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi seluruh warganya. Reformasi politik terkait dengan reformasi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti bidang hukum, ekonomi, sosial budaya serta hakamnas. Dalam bidang ekonomi, kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip kesejahteraan bersama yang kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang. Maka dari itu perlu dilakukan langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Reformasi yang mengarahkan negara Indonesia menjadi lebih baik merupakan bentuk dari keinginan rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kaya budaya serta sumber dayanya sangat rentan menjadi incaran para oknum radikal sebagai pemecah belah. Berakhirnya rezim otoriter tidak hanya menjadi momen emas bagi bangsa tetapi kesempatan emaspula bagi gerakan radikal untuk menggoyahkan demokratisasi dan menggugat formasi Indonesia yang berbasis pluralism dan multikulturalisme(Haris 2014: 158).Perpecahan antar suku di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat miris jika terjadi. Masa reformasi merupakan awal dari perjuangan seluruh tumpah darah bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Oleh karena itu, sebagai rakyat Indonesia yang memiliki nilai moral yang baik memiliki tanggung jawab yang besar untuk saling menghargai antar individu. Kesadaran ini harus dibentuk dari satuan terkecil yaitu setiap individu Bangsa Indonesia sehingga reformasi yang dibuat tidak hanya atas dasar pengaruh dari kebijakan pemerintah, tetapi juga pengaruh kemoralan dari rakyatnya.

**C. KESIMPULAN**

 Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indoesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Madani merupakan penggambaran sifat terhadap kehidupan masyarakat madinah. Kehidupan masyarakat Madinah merupakan penggambaran masyarakat yang ideal dalam bidang apapun karena mereka hidup rukun dengan toleransi dan menjalankan kehidupan bersumber pada al-quran.Masyarakat madani merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hak kemanusiaan yang ada, sehingga masyarakat ini tidak dapat dimanipulasi oleh negara Pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diupayakan.
 Kerukukan antar umat beragama juga menjadi suatu kondisi dimana semua golongan agama dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya agar selalu terjalin hubungan kekeluargaan yang erat antar umat beragama sehingga dengana adanya kerukunan maka konteks pembangunan negara juga akan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dari adanya persatuan agar terciptanya kehidupan sosial yang aman dan tentram, serta saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundammental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta ini moral terbentuk dari masing-masing pripadi yang bergantung pada keimanan yang dimiliki. Keimanan merupakan sumber dari akhlak dan moral yang terbentuk. yang sejalan dengan masyarakat madani yang memiliki sifat sama dengan kehidupan masyarakat Madinah. Oleh karena itu diharapkan penerapan nilai nilai pancasila agar etika kehidupan berjalan dengan sebaik mungkin sehingga terciptapenghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai bidang kehidupan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Eko Nursalim. 2016. PENDIDIKAN ISLAM MENUJU MASYARAKAT MADANI di ERA GLIBALISASI (Suatu Ikhtiar Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean/MEA). *Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, 10(1): 44*
2. Rakhmat, Jalaluddin. 1991. *ISLAM AKTUAL : REFLEKSI-SOSIAL SEORANG CENDEKIAWAN MUSLIM.* Bandung: Penerbit Mizan.
3. Srijanti, S.K , Pramono. 2009*. ETIKA MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAM MODERN.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
4. Suroto. 2015. KONSEP MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA DALAM MASA POSTMODERN(SEBUAH ANALITIS KRITIS). *JurnalPendidikan Kewarganegaraan, 5(9):667-66*
5. Hakim,Luqman. 2013. PROBLEM DEMOKRATISASI DAN GOOD GOVERNANCE DI ERA REFORMASI. Malang: Penerbit Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia
6. Haris, Syamsuddin. 2014. Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
7. *Suranto (2013) pancasila sebagai paradigma pembangunan karakter bangsa (jurnal
 dialog kebijakan publik)*
8. *Syaiful Anwar (2016) PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER BANGSA (Dosen FTK IAIN Raden Intan Lampung)*
9. Ambiro Puji Asmaroini (2017) Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, MENJAGA EKSISTENSI PANCASILA DAN PENERAPANNYA BAGI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI Universitas Muhammadiyah Ponorogo